



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**UNIT KERJA** : DINAS TENAGA KERJA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : TRI NURUL BASKORO AJI
2. Jabatan : KEPALA UNIT
3. NHK : 722293

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 275.000.000

1. Tanah Seluas 225 m2 di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI  
Rp. 25.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 305 m2/135 m2 di KAB / KOTA  
KENDAL, HIBAH TANPA AKTA Rp. 250.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 70.500.000

1. MOTOR, HONDA GL160D Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp.  
6.000.000
2. MOTOR, HONDA NC11B3C A/T Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.  
4.500.000
3. MOBIL, DAIHATSU TARUNA CSR 1.6/F500RV Tahun 2001, HASIL  
SENDIRI Rp. 60.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. ---

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 345.500.000

**III. HUTANG** Rp. 152.581.536

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 192.918.464

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.